

Judul : Dewan Perwakilan Rakyat RI: Usulan Resolusi Rohingya Didukung Sidang Parlemen Dunia
Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

USULAN RESOLUSI ROHINGYA DIDUKUNG SIDANG PARLEMEN DUNIA

Kepiawiaan lobi dan diplomasi parlemen Indonesia semakin menunjukkan kelasnya di level internasional. Buktinya, di sidang ke-137 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Saint Petersburg, Rusia, Minggu, 15 Oktober 2017, ide dan gagasan parlemen Indonesia mengenai resolusi Rohingya diterima mayoritas parlemen dari berbagai negara.

Delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin Fadli Zon dan 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lainnya yakni Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadjatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem) sukses dalam menjalankan misi kemanusiaan di level internasional.

Fadli mengaku senang proposal *emergency items* terkait krisis Rohingya yang diusulkan oleh delegasi parlemen Indonesia, berhasil diadopsi menjadi resolusi sidang IPU ke-137.

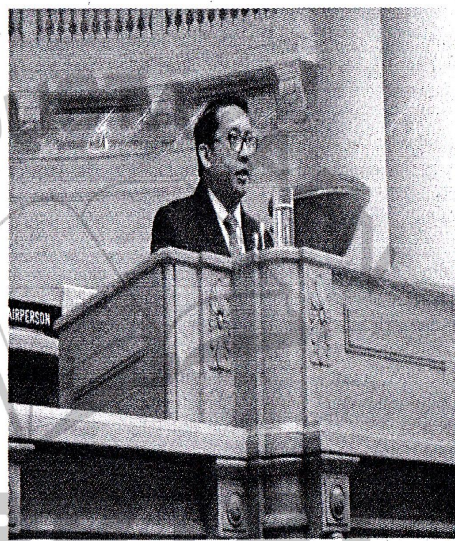
Berpidato di hadapan para parlemen dunia, Fadli mengungkapkan bahwa Indonesia

Penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine akan lebih cepat tercapai jika ada dorongan anggota parlemen dunia.

sangat peduli terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine. Bagi Indonesia, masalah Rohingya sangat krusial dan fundamental karena menyangkut nilai-nilai universal yang harus dibela.

Oleh sebab itu, parlemen Indonesia memiliki sikap yang konsisten terhadap krisis Rohingya. Bahwa isu ini membutuhkan dan harus mendapatkan perhatian resmi dari forum parlemen, baik itu forum parlemen regional ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), dan IPU. "Untuk itu kami mengajukan isu Rohingya sebagai *emergency items* untuk dimasukkan ke dalam resolusi IPU," ujar Fadli.

Menurut Fadli, diterimanya isu Rohingya sebagai resolusi IPU ke-137 di Rusia menjadi catatan penting bagi forum parlemen



regional seperti AIPA, yang tidak memberikan sikap apa pun terhadap krisis Rohingya.

"Diterimanya isu Rohingya ke dalam resolusi IPU menjadi bukti bahwa IPU sebagai forum parlemen dunia benar-benar hadir, tidak menutup mata dan telinga, saat krisis kemanusiaan tengah berlangsung di salah satu kawasan di dunia."

Kata Fadli, penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine akan

lebih cepat tercapai jika ada dorongan IPU sebagai representasi anggota parlemen dunia. Itu sebabnya melalui IPU, Indonesia bersama Bangladesh, Turki, Irak, Iran, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab, mendorong agar isu Rohingya masuk menjadi salah satu resolusi di IPU. "Dan upaya tersebut kini berhasil," ujarnya.

Berhasilnya dorongan mengenai krisis Rohingya tidak lepas dari upaya lobi yang dilakukan Wakil

Ketua DPR Fadli Zon terhadap sejumlah negara, termasuk tuan rumah yang diwakili Wakil Ketua Senat Federasi Rusia Umakhanov.

Tak hanya masalah Rohingya, Fadli dalam pertemuan dengan perwakilan parlemen Rusia juga menyinggung isu Papua Barat, yang belakangan ini aktif dikampanyekan oleh beberapa negara terkait isu hak asasi manusia (HAM).

Fadli Zon menegaskan kepada delegasi Rusia bahwa Papua merupakan bagian integral Indonesia, dan meluruskan sejumlah tuduhan yang direkayasa terkait isu pelanggaran HAM.

Kuatnya lobi yang dilakukan parlemen Indonesia, direspons baik oleh Umakhanov. Kata dia, kemajuan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi pembelajaran penting bagi wacana demokrasi di dunia.

Sebagai data, hubungan Indonesia-Rusia sudah lama terjalin di berbagai bidang mulai ekonomi, politik, budaya dan pariwisata. Neraca perdagangan Indonesia - Rusia masih surplus untuk Indonesia dan masih bisa terus dikembangkan khususnya terkait bidang pertahanan. ●

INFORIAL